

**Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Duren  
Sawit Tahun 2019**

**Satria Rahmadi**

[aatia.satria12@gmail.com](mailto:aatia.satria12@gmail.com)

**Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik- Universitas Diponegoro, Semarang**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi proses Implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu melalui penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Wirausaha di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisa dokumen. Wawancara dilakukan kepada Kepala Satuan Pelaksana PKT, SKPD Pendamping PKT Bidang Perindustrian, dan SKPD Pendamping PKT Bidang UKM Kecamatan Duren Sawit. Implementasi PKT di Kecamatan Duren Sawit pada penelitian ini menggunakan analisa berdasar teori dari George Edward III, yang pada hasilnya mengatakan bahwa faktor yang terlibat untuk melihat kinerja implementor yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi menjadi terlihat bagaimana dari setiap tahapan proses program mulai dari Pendaftaran hingga Permodalan melibatkan keempat faktor dari teori tersebut, sehingga mewujudkan apa yang dituju dalam dasar program ini yang mengatakan terwujudnya iklim kolaboratif antar pemerintah, dunia wirausaha, dan masyarakat sehingga nanti pada kurun waktu program ini jalankan dapat menciptakan target makro minimal 200.000 wirausaha baru dari hasil binaan di seluruh kecamatan yang berada di DKI Jakarta.

Kata kunci: deskripsi dan identifikasi implementasi PKT, Implementor PKT, analisa faktor implementasi, kolaboratif.

**Implementation of the Integrated Entrepreneurship Development Program in Duren Sawit  
District in 2019**

**Satria Rahmadi**

[Aatia.satria12@gmail.com](mailto:Aatia.satria12@gmail.com)

**Politics and Government Department, Faculty of Social and Political Science**

**– Universitas Diponegoro, Semarang**

**Abstract**

This study aims to describe and identify the process of implementing Integrated Entrepreneurship Development through the implementation of Entrepreneurial Capacity Building in Duren Sawit District, East Jakarta. This study uses a descriptive qualitative approach. Data was collected through interviews, observation, and document analysis. Interviews were conducted with the Head of the PKT Implementing Unit, the PKT Assistant SKPD in the Industrial Sector, and the PKT Facilitating SKPD for the SME Sector, Duren Sawit District. The implementation of PKT in Duren Sawit Subdistrict in this study used an analysis based on the theory of George Edward III, which in the result said that the factors involved to see the performance of the implementor were; communication, resources, disposition, and bureaucracy can be seen how from every stage of the program process from Registration to Capital involves the four factors of the theory, thus realizing what is intended in the basis of this program which says the realization of a collaborative climate between governments, the world of entrepreneurship, and the community so that later in the period when this program is run, it can create a macro target of at least 200,000 new entrepreneurs from the results of being fostered in all sub-districts in DKI Jakarta.

**Keywords:** description and identification of PKT implementation, PKT Implementor, implementation factor analysis, collaborative.

## A. Pendahuluan

Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia UMKM menjadi satu aspek perekonomian yang sedang naik daun dan digencarkan oleh pemerintah karena program yang bersangkutan dengan pengembangan UMKM ini berkaitan sangat erat dengan kegiatan dan aktivitas berwirausaha atau kewirausahaan.

Kewirausahaan memiliki definisi secara umum yaitu sebuah proses menciptakan peluang ekonomi dengan inovasi yang dapat memberikan manfaat lebih untuk banyak orang. Program yang dianggap menjadi jawaban solutif dari berbagai macam permasalahan sosial ekonomi ini diikuti dan dijalankan pula oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pengembangan perekonomian masyarakatnya.

Pemerintah dari berbagai tingkat dari daerah sampai pusat dan segenap masyarakat yang berprofesi sebagai wirausahaan diharapkan dapat saling mendukung dengan adanya wadah kebijakan guna mempermudah kelancaran aktivitas ber wirausaha, karena diharapkan bahwa UMKM dapat menggerakkan perekonomian masyarakat serta diharapkan menjadi sebuah solusi dari berbagai macam permasalahan sosial dan ekonomi yang terdapat di masyarakat.

Peran penting dari pembangunan ekonomi makro di Indonesia melalui UMKM menunjukkan jumlah peserta dengan data yang cukup besar contoh pada tahun 2015, Jumlah UMKM diperkirakan mencapai 60,7 Juta unit dan sebagian besar merupakan berskala Mikro kecil dengan persentase 98,7 persen. Pertumbuhan UMKM dalam periode 2011-2015 mencapai 2,4 persen, dengan pertumbuhan terbesar terdapat pada usaha menengah yaitu sebesar 8,7 persen.<sup>1</sup>

Pada periode yang sama (2011-2015), kapasitas UMKM untuk menyerap tenaga kerja terus mengalami peningkatan yaitu rata-rata sebesar 5,9 persen. Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja UMKM mencapai lebih dari 132 juta orang. Namun sebagian besar dari tenaga kerja

---

<sup>1</sup> "UMKM Berperan Mendukung Pencapaian Distribusi Pendapatan Guna Kurangi Kesenjangan", diakses dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/umkm-berperan-mendukung-pencapaian-distribusi-pendapatan-guna-kurangi-kesenjangan/> ,pada tanggal 26 Mei 2019 Pukul 08.30

UMKM (88,6 persen) masih merupakan tenaga kerja informal pada usaha-usaha berskala mikro kecil. Kontribusi yang dimiliki UMKM dalam pembangunan perekonomian Negara juga dapat dilihat pada Produk Domestik Bruto (PDB), pada periode 2009-2013 kontribusi UMKM mencapai 587,6 persen, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,7 persen. Sebagian besar PDB UMKM tersebut disumbangkan oleh usaha mikro sebanyak 49,6 persen. Berdasarkan sektor, kontribusi PDB UMKM yang paling besar terdapat pada sektor perdagangan, pertanian dan Industri pengolahan.<sup>2</sup>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan berupaya terus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai kebijakan pembangunan diarahkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi. Untuk menentukan prioritas pelaksanaan program-program pembangunan daerah, maka disusunlah Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang terdiri dari 60 kegiatan. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2017 Tentang percepatan pelaksanaan kegiatan strategis daerah, KSD merupakan kegiatan yang disusun sebagai pelaksanaan RPJMD dalam memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh penanggung jawab KSD. Salah satu KSD yang terkait dengan kewirausahaan adalah Program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan terpadu atau PKT.

Fokus dari penelitian ini mencoba untuk dapat mengetahui dan menggambarkan jalannya Implementasi dari Pengembangan Keiwausahaan Terpadu melalui Program Peningkatan Kapasitas Wirausaha dari tahap Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan Keuangan hingga Fasilitasi Permodalan.

## **B.Kerangka Teoritis**

### *1. Implementasi kebijakan (Policy Implementation)*

---

<sup>2</sup> "Modernisasi UMKM atasi permasalahan, Diakses dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/idf-2019-modernisasi-umkm-atasi-permasalahan-masyarakat-bantu-perekonomian-nasional/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2019 Pukul 08.30

Secara etimologis pengertian Implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip Solichin Abdul Wahab adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak terhadap sesuatu.<sup>3</sup> Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa sumber daya, salah satu diantaranya sumber daya manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan pemerintah maupun swasta yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh *policy makers*.

Untuk menghadapi tantangan itu terdapat beberapa strategi pengembangan teori:

1. Teori George C. Edwards III

Menurut Pandangan Edwards III, terdapat empat faktor penentu serta variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) Komunikasi ; (2) sumber daya; (3) disposisi ; (4) struktur birokrasi.<sup>4</sup>

Berikut penjelasan lebih lanjut dan mendalam mengenai faktor penentu yang disebutkan diatas:

- a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.<sup>5</sup>

- b. Sumber daya

Sumber daya dimaksudkan terbagi menjadi dua yaitu; sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya ini merupakan faktor penting untuk implementasi agar efisien dan efektif. Sumber daya ini tidak terlepas dari beberapa agen pelaksana yang berkompeten serta terlibat

---

<sup>3</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan public* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 57.

<sup>4</sup> Subarsono, *Analisis kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.90.

<sup>5</sup> Subarsono, Loc. Cit.

didalamnya dan saling akan berkaitan berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan dari sebuah program kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti; Komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan dan dicitakan.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasi-kan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) SOP. SOP ini yang nantinya akan menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

## 2. Teori Kewirausahaan Sosial ( *Social Entrepreneurship Theory*)

Kewirausahaan sosial merupakan usaha penemuan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk penyelesaian masalah sosial, dimana solusi tersebut membutuhkan banyak elemen-elemen yang terkait dengan inovasi bisnis yang sukses .<sup>6</sup>

Kewirausahaan sosial tidak terlepas dari beberapa aspek penting yaitu diantaranya; nilai sosial dan ekonomi, masyarakat, inovasi, dan organisasi. Dalam pengertiannya kewirausahaan sosial merupakan penciptaan nilai sosial yang dihasilkan dari kolaborasi bersama individu dan organisasi pemerintah maupun privat yang melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam penciptaan inovasi social dalam kegiatan ekonomi. Menurut pengertian diatas teori kewirausahaan sosial ini cukup relevan dengan penerapan implementasi dari program mengenai peningkatan kewirausahaan terpadu.

---

<sup>6</sup> Hery Wibowo & Soni akhmad nulhaqim, *Kewirausahaan Sosial: merevolusi pola pikir menginisiasi mitra pembangunan*, (Bandung: Unpad Press, 2015), hlm. 9.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan penelitian ini ialah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, kondisi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Filsafat *postpositivisme* sering disebut sebagai *paradigm interpretif* dan *konstruktif*, yang memandang realita sosial sebagai sesuatu yang *holistic* atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif.<sup>7</sup>

tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberi gejala fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>8</sup>

Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan dan mengidentifikasi Implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu secara objektif berdasarkan data yang peneliti peroleh. Penelitian jenis ini juga dirasa cocok dengan tujuan penelitian, maka peneliti berusaha untuk menggambarkan dan medeskripsikan Implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu melalui penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Wirusaha di Kecamatan Duren Sawit berdasarkan data yang diperoleh.

Prosedur pengumpulan data untuk penelitian ini ialah menggunakan Wawancara yang berusaha untuk mengetahui sesuatu informasi lebih mendalam dan melakukan studi pendauluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini berdasar diri pelaporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya keyakinan pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.<sup>9</sup> Observasi juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengamati aktivitas kerja, gejala-gejalana dari informan terkait. Dokumentasi menjadi salah satu prosedur dalam penelitian ini yang berguna untuk menjadi penguat bahan bukti akurat penelitian.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 8.

<sup>8</sup> Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Muda University Press, 1983) hlm. 64.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 143.

Setelah Implementasi dan segala proses tahapan program pengembangan kewirausahaan terpadu sudah terdeskripsikan, maka peneliti akan menganalisa dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung ataupun penghambat dalam proses implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Program Peningkatan Kapasitas Wirausaha di Kecamatan Duren Sawit Tahun 2019. Perlu ditekankan bahwa data yang peneliti dapatkan dan kumpulkan bersumber dari sumber yang valid sehingga memastikan bahwa penelitian ini mendapatkan bukti-bukti serta kesimpulan yang kuat.

## **D. Pembahasan**

### **1. Implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Duren Sawit Tahun 2019**

#### **A. Pendaftaran**

Pada tahapan awal calon peserta akan melakukan registrasi secara langsung atau *offline* yang dapat dilakukan datang langsung ke Kecamatan dan masuk kedalam database peserta nantinya yang akan dihimpun oleh setiap pendamping. Untuk persyaratan pendaftaran bagi para calon peserta hanya membutuhkan *Foto Copy* KTP dan KK.

Pada tahapan pendaftaran ini sudah terbentuk pola komunikasi dan Penyerahan penugasan dari Kecamatan ke kelurahan agar dapat melakukan sosialisasi guna menghimpun dan memberi pengetahuan mengenai syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta untuk dapat menjadi peserta program kegiatan PKT nantinya.

Jadi, pada tahapan Pendaftaran ini ditemui beberapa temuan bahwa sesuai dengan Perbug dan dasar hukum yang berlaku bahwa kecamatan dan kelurahan akan melakukan koordinasi serta mendelegasikan tugas guna melaksanakan sosialisasi mengenai program dan tahapan berikutnya setelah melakukan sosialisasi, maka bagi warga yang tertarik serta ingin mengikuti Program PKT ini akan segera memenuhi syarat dan prasyaratnya untuk dapat menjadi peserta nantinya. Pada tahun 2019 terdapat jumlah peserta yang mengikuti tahapan pendaftaran sebanyak 1059 peserta yang berasal dari 7 kelurahan yang berada di Kecamatan Duren Sawit.

## **B. Pelatihan**

Pelatihan akan dilaksanakan sebanyak 3 Minggu dalam satu bulan, namun pelaksanaannya ini tidak selalu berturut-turut. Dalam Pelatihan 3 Minggu itu menu dan materinya akan berbeda-beda. pelaksanannya dalam sekali pelatihan akan diikuti oleh 40 Peserta dan satu pelatihan akan berlangsung selama 4 Hari dengan berbagai macam materi dan jenis pelatihannya. Kemudian rincian teknis lebih mendalam disebutkan bahwa Pelatihan ini akan dilaksanakan dari jam 08.00 – 15.00 dengan mendapat fasilitas berupa *snack*, makan, dan fasilitas yang disiapkan pendamping serta *stakeholders* atau pihak yang terlibat dan sedang berkolaborasi dalam pelaksanaan pelatihan PKT ini.

Dalam pelaksanaan pelatihannya ini program PKT bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru dan tentunya tetap segala materi dan fasilitas dari pelatihannya ini mengakomodir kebutuhan dari peserta PKT itu sendiri. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 762 peserta yang berasal dari 7 kelurahan yang berada di Kecamatan Duren Sawit.

## **C. Pendampingan**

Pendampingan ini menjadi salah satu kegiatan yang dapat dikatakan berkesinambungan dan terus berlangsung hingga P6 Pelaporan Keuangan & P7 Permodalan beserta proses tahapan lainnya.

Proses pendampingan ini sebenarnya sudah berlangsung dari tahapan awal dengan para pendamping memberi arahan untuk mendaftar, mengarahkan dan menyeleksi para calon peserta kemudian mereka mengelompokkan juga dari sekian banyak perndaftar per-angkatan. Kemudian, pada tahapan pelatihan pendamping juga bertugas banyak sebagai fasilitator yang harus dapat melaksanakan pelatihan sesuai dengan jadwal yang berlaku dengan berkolaborasi bersama *stakeholders* yang terkait. Pada proses tahapan ini dapat dikatakan bahwa selain fungsi fasilitator para pendamping juga harus dapat memonitor beberapa dan seberapa jauh progress dari para peserta binaan Program PKT ini. Tahapan pendampingan pada tahun 2019 berhasil mendapatkan sebanyak 800 peserta.

## **D.Perizinan**

Peserta PKT yang sudah melalui tahapan pelatihan dan dalam tahap pendampingan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan fasilitas perizinan untuk usaha yang nantinya dikoordinasikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.

Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelayanan dan pembinaan diperlukan juga peran dari Dinas PTSP terjadi pada tahapan P4 Perizinan ini bahwa ada peran dari dinas PTSP ini untuk memberlakukan penjaringan formulir pendaftaran dan menginput data keperluannya di Jak Evo website pengelolaan Dinas PTSP ini

Kemudian untuk informasi pendampingan dan proses verifikasi dilakukan oleh para pendamping dan nantinya hasil dari pengumpulan data peserta perizinan di kolektifkan atau di kumpulkan oleh para pendamping dari satuan pelaksana PKT dan pada tahapan akhirnya di validasi oleh Kasatpel.<sup>10</sup> Pada data peneliti menunjukkan kenaikan pada tahun 2019 dan memiliki kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, dengan sebanyak 498 peserta.

Pada tahapan P4 Perizinan ini terdapat banyak jenis perizinan yang dapat digunakan dan diurus oleh para peserta PKT guna Legalitas dan juga mendapat perlindungan dalam berusaha. Untuk perizinan terdapat PIRT, IUMK, BPOM, Sertifikat Halal, HKI.

## **E. Pemasaran**

Dalam tahapan Pemasaran ini terbagi akan dua jenis yaitu; pemasaran yang dilakukan *offline* dan *online*. Dalam memasarkan hasil produk dari para peserta PKT dilakukan pemasaran yang difasilitasi dalam bentuk; pemasaran produk yang dilakukan secara mandiri yang berbentuk kegiatan pameran atau Bazar. Dan pada pemasaran online di pasarkan ke berbagai market place yang tersedia di era digital seperti sekarang ini. Pada tahun 2019 pelaksanaan P5 Pemasaran ini terdapat kenaikan dengan total peserta sebanyak 317 peserta. Kenaikan ini juga dialami oleh kelurahan Pondok kelapa yang menempati posisi pertama dengan jumlah peserta sebanyak 103 peserta, diikuti kelurahan Duren Sawit dengan 63 peserta, dan Keluraahan Malaka Jaya dengan 41 peserta.

Pada pelaksanaan P5 Pemasaran ini dilakukan kegiatan Bazaar yang biasanya dilakukan sebanyak 8 kali pelaksanaan dalam satu tahun dan kegiatannya ini melibatkan waktu sebanyak 2 hari pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya terdapat 30 tenant yang di sediakan oleh fasilitator masing-masing tendanya diisi 2 orang saja sebagai penjual dan peraga produk yang mereka

---

<sup>10</sup> Buku petunjuk operasional PKT, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, hlm. 8

miliki. Pada tahun 2019 terdapat 2 Bazar dari kecamatan dan Pop Market yang kegiatan ini terlaksana dari Pagi-sore dan dilanjutkan Sore-malam harinya yang dilakukan selama 4 hari pelaksanaan.

#### **F. Pelaporan Keuangan**

Dalam rangka membangun, mengembangkan, dan mengintegrasikan aplikasi disebutkan oleh narasumber Pihak Bidang KUKMP selaku penyelenggara seharusnya bekerja sama dengan pihak lainnya dalam pembuatan aplikasi berbasis pengelolaan keuangan disebutkan bahwa aplikasi tersebut adalah SIAPIK, selain itu para pendamping kecamatan melakukan pelatihan secara mandiri kepada peserta dengan metode pencatatan pembukuan secara manual. Setelah melakukan proses pelatihan pelaporan keuangan maka bagi peserta yang mengikuti kegiatan mendapatkan benefit untuk menjadi syarat mengajukan akses permodalan. Kemudian selain itu mendapat keuntungan pula berupa potongan dalam pengurusan HKI hak kekayaan intelektual. pada tahun 2019 dengan hanya diikuti oleh sebanyak 37 peserta saja pada segmentasi pelatihan pelaporan keuangan P6 Program PKT ini.

#### **G. Permodalan**

Pada tahapan ini peneliti kurang dapat informasi lebih mengenai akses permodalan mengenai besaran modalnya. Namun pada kegiatan permodalan ini di sponsori dan bekerja sama dengan Bank DKI saja sejauh ini karena MoU kegiatan PKT ini sedari dulu sudah dengan Bank DKI saja, kemudian proses dari permodalan ini lebih kepada metode secara personal antara peserta dengan pendamping, nantinya pendamping memberi saran dan membantu dalam hal melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan akses permodalan bagi para peserta binaannya. Tiap tahunnya kecamatan memberi 10 kuota bagi peserta yang dapat dan sudah memenuhi seluruh persyaratan untuk mendapatkan akses permodalan. positifnya menurut data statistik tetap mengalami kenaikan pada tahun 2019 dengan adanya 6 Peserta yang dapat akses Permodalan.

## **2. Hasil Analisis Implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Duren Sawit**

Demi sebuah kelancaran implementasi terdapat faktor-faktor pendukung untuk menunjang berjalannya proses implementasi, implementasi merupakan aspek terpenting dalam seluruh berjalannya kebijakan. Udji (Abdul Wahab, 1991) mengemukakan:

“implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan.”<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model dari George Edward III yang akan dijelaskan dalam analisa penjabaran berikut ini.

### **2.1. Komunikasi**

Proses Transmisi ini terjadi dengan pelibatan Informasi secara langsung antara Suku Dinas PPKUKM beserta Kepala Seksinya perbidang dengan Para anggota pendamping Kasatpel PKT di kecamatan Duren Sawit. Metode secara langsung ini sangatlah mendukung proses instruksi yang dilakukan Suku Dinas terhadap Kasatpel di Kecamatan Duren Sawit berjalan agar informasi menjadi akurat dan jelas. Sehingga pada proses implementasi dari program ini para pendamping di lapangan sebagai eksekutor utama dan ujung tombak dari Implementasi mengetahui hal yang mereka lakukan berdasarkan interpretasi terhadap instruksi yang diberikan. Proses Transmisi ini terjadi dengan pelibatan Informasi secara langsung antara Suku Dinas PPKUKM beserta Kepala Seksinya perbidang dengan Para anggota pendamping Kasatpel PKT di kecamatan Duren Sawit. Metode secara langsung ini sangatlah mendukung proses instruksi yang dilakukan Suku Dinas terhadap Kasatpel di Kecamatan Duren Sawit berjalan agar informasi menjadi akurat dan jelas. Sehingga pada proses implementasi dari program ini para pendamping di lapangan sebagai eksekutor utama dan ujung tombak dari Implementasi mengetahui hal yang mereka lakukan berdasarkan interpretasi terhadap instruksi yang diberikan.

### **2.2. Sumber Daya**

Sumber daya dikatakan menjadi faktor yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya sebuah implementasi karena sangatlah kritis perannya menentukan implementasi berjalan efektif atau tidaknya, salah satunya ialah sumberdaya manusia dalam hal ini sebagai implementor program PKT ketidakberadaan mereka tentu hanya membuat kebijakan atau program PKT ini berakhir diatas kertas saja tanpa dilakukan atau dijalankan di lapangan.

---

<sup>11</sup> Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia “*Analisis Kebijakan Publik*” (Jakarta, LAN-RI, 2008), Hlm. 31.

Pembahasan mengenai kapabilitas dan keterampilan dari pendamping sesuai data yang didapatkan oleh peneliti pada dokumen survey profil pendamping Program PKT, bahwa kualifikasi yang dibutuhkan ialah lewat *requirement* dan seleksi yang dilakukan oleh Dinas PPKUKM. Pada proses ini tentu para pendamping diperlukan kemampuan teknis *soft* maupun *hard* nya karena bertujuan membuat optimalisasi dalam rangka pendampingan Program PKT untuk dapat melahirkan wirausaha baru.

### **2.3. Disposisi**

Disposisi menjadi faktor terpenting ketiga yang tentu dibutuhkan untuk jalannya sebuah implementasi, ketika proses komunikasi sudah berjalan dan berakibat pada agen implementor sudah mengerti apa yang harus dilakukan, kemudian ketika para implementor sudah memiliki kapabilitas serta keterampilan yang memenuhi maka dibagian ini implementor harus memiliki sikap rasa yang cenderung positif untuk melaksanakan implementasi program kebijakan ini, meliputi; tanggung jawab, komitmen, kejujuran.

Unit birokrasi yang berbeda cenderung memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan. ketidaksepakatan intra dan antar lembaga menghambat kerja sama dan menghambat implementasi. dalam satu area kebijakan, masing-masing instansi terkait mungkin memiliki prioritas yang berbeda, komitmen yang berbeda, dan metode penanganan masalah yang berbeda.

Dalam implementasi Program PKT yang terjadi justru pernyataan George Edward dapat dinegasikan, perbedaan yang timbul antara mereka yang memiliki rasa tanggung jawab (disposisi) yang sama dalam melaksanakan Program PKT, namun berbeda lembaga. Perbedaan ini menciptakan hubungan kerja sesuai porsi dan batasan otoritas dalam upaya implementasi Program PKT secara efektif.

### **2.4. Struktur Birokrasi**

SOP berguna sebagai pedoman bagi setiap pendamping bertindak dan mencegah adanya proses yang melibatkan kerumitan struktural birokrasi yang menghambat dan terlalu panjang dan cenderung melemahkan pengawasan dan mengakibatkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Standarisasi dan prosedur pelaksanaan yang jelas Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implemmtasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang terpenting dari setiap organisasi adalah adanya

prosedur operasi standar atau *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP ini yang menjadi standar dan pedoman bagi para implementor dalam bertindak.

Dalam Implementasi Program PKT terdapat SOP berupa buku petunjuk Operasional yang terdapat didalamnya ialah Data Alur Umum PKT dan petunjuk bagi pendamping dari tracking data status, melihat peserta, kemudian cek pemberkasan untuk kelompok wirausaha dan tahapan terakhir yaitu verifikasi tahapan.

## **E. Kesimpulan**

Upaya implementasi yang dilakukan oleh implementor yang melibatkan Kepala satuan pelaksana PKT Kecamatan Duren Sawit dengan SKPD Pendamping PKT Kecamatan Duren Sawit beserta para agen pelaksana lainnya yang terkait dalam pembahasan meliputi; kualitas komunikasi dan tipe dari komunikasi yang digunakan ialah komunikasi langsung secara formal dan non formal. formal ialah berdasarkan struktural birokrasi yang biasanya berbentuk instruksi dari Kepala Seksi yang diturunkan kepada Kepala Satuan Pelaksana dan yang kemudian di transmisikan kepada para pendamping sebagai ujung tombak implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang memiliki sentral kegiatan di kecamatan. Komunikasi yang dilakukan bukan hanya itu, komunikasi non-formal pun terdapat pada faktor komunikasi implementasi PKT ini hal ini membuktikan adanya hubungan intrapersonal antar atasan dan bawahan yang berjalan karena membuktikan adanya keluasaan dalam proses implementasi PKT dengan membuka kesempatan para pendamping yang pada tingkat pelaksanaan di level paling bawah dapat memberi usul dan melakukan inisiasi pada proses implementasi. Bentuk dari kedua komunikasi ini tentu memiliki satu tujuan yaitu perwujudan produktivitas dan kinerja hasil komunikasi kolektif yang optimal untuk implementasi program PKT ini.

## **F. Saran**

Untuk menghadapi tantangan kedepan mungkin kebijakan yang berbau dengan pembinaan seperti ini akan kalah dengan kebijakan yang lebih favorit dimata masyarakat seperti

bantuan langsung tunai, saya dapat memberi saran bahwa inovasi dan ke-efektifan dibidang teknologi dan digitalisasi harus dapat lebih di maksimalkan dan disesuaikan karena kita harus dapat beradaptasi dengan zaman. Meski hal ini pun sudah dilakukan dalam setiap kegiatan tahapan alur Program PKT ini. dengan ditambah konsistensi yang harus dijaga untuk terus dapat menciptakan pelayanan kepada peserta atau masyarakat binaan agar tercipta semakin banyak wirausaha baru di Duren Sawit, Jakarta Timur dan umumnya Provinsi DKI Jakarta.

## **Daftar Pustaka**

George C. Edwards III, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly

Hery wibowo dan Soni A. nulhaqim, 2015. *Kewirausahaan Sosial: merevolusi pola pikir menginisiasi mitra pembangunan*. Bandung: Unpad Press

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2008, *Analisis Kebijakan Publik Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III*. Jakarta: LAN

Moleong dan Lexy, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, 1983. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Muda University Press

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Saiman leonardus, 2009. *Kewirausahaan: Teori, praktik, dan kasus-kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Subarsono, 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR

Sugiyono, 2016. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul, 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yulianto kadji, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press